

Geopark Maros-Pangkep Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Bissu Di Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan



DANNI REINHARD ARIANTO
E041201054



DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

SKRIPSI

Geopark Maros-Pangkep Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Bissu Di Segeri, Kabupaten Pangkepene Kepulauan

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

**DANNI REINHARD ARIANTO
E041201054**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Geopark Maros-Pangkep Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi
Bissu di Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Yang Diajukan oleh :

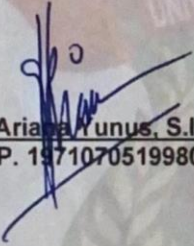
Danni Reinhard Arianto

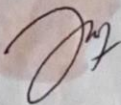
E041201054

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Arianto Yunus, S.IP., M.Si.
NIP. 197107051998032002


Ummi Suci Fathia Bailussy, S.IP., M.Si.
NIP. 19731122 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.
NIP. 196921231 199003 1 023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Geopark Maros-Pangkep Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Komunitas Adat Bissu di Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing utama ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si. dan ibu Ummi Suci Fathia Bailussy, S.IP, M.Si. karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, 25 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Dari Reinhard Arianto

NIM E041201054

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Geopark Maros-Pangkep Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Komunitas Bissu di Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan” pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada program studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat diharapkan oleh penulis.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih teriring doa kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan , kepada kedua orang tua penulis Abraham dan Levina yang telah merawat, membesarkan, membimbing, memberi dukungan, dan membiayai selama pendidikan dan kebutuhan hidup penulis. Kepada kakak dan adik penulis berturut-turut Haji Richard dan Indah Cecilia Putri, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi ini.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

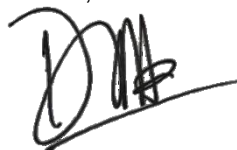
1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memimpin Universitas Hasanuddin selama periode ini dan memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu di program studi Ilmu Politik;
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan;
3. Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Departemen Program Studi Ilmu Politik, sekaligus menjadi penguji saya. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang di dapatkan penulis selama berkuliah di Strata 1 Ilmu Politik FISIP Unhas;
4. Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing utama saya yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini;
5. Ummi Suci Fathia Bailussy, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing kedua saya sekaligus penasihat akademik dan menjadi ibu kedua saya bahkan kakak yang baik di kampus selama berkuliah di S1 Ilmu Politik;
6. Dian Ekawaty, S.IP., M.A., selaku dosen penguji yang memberikan

masukan dan saran pada saat ujian seminar proposal sampai seminar hasil;

7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan Strata 1 Ilmu Politik;
8. Kepada seluruh tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Departemen Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat berbagai pelayanan administrasi lainnya;
9. Kepada organisasi pertama saya saat berkuliah yaitu Himapol FISIP Unhas yang telah memberikan pengalaman yang baik dalam manajemen organisasi;
10. Kepada teman-teman DINAMIS Angkatan 2020 yang telah memberikan kenangan suka maupun duka serta senantiasa memberikan bantuan berupa dukungan, nasihat, dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada sahabat, teman dan “tempat pulang” yaitu Vanessa Elsayana Bandau, yang setia menemani saya selama masa perkuliahan, dan memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk selama penyusunan skripsi berlangsung;
12. Kepada Abim, Eki, Sessung, Tasya, dan Marlina yang menemani saya untuk turun penelitian di Segeri, Pangkep. Semoga dimudahkan segala urusan orang-orang baik;
13. Kepada kawan-kawan seperjuangan Kiki, Zam, Gope, Kardi, Fito, Jefri, Mail, Lala, Burhan yang senantiasa menemani, menyemangati, dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini;

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini merupakan langkah awal sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Politik, yang kemudian dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya, serta juga bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu Politik. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan menghargai semua kritik dan saran yang sifatnya membangun dari setiap pihak yang membaca skripsi ini.

Makassar, 27 Februari 2024



Danni Reinhard Arianto

ABSTRAK

Danni Reinhard Arianto E041201054. Geopark Maros-Pangkep Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Bissu di Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Di bawah bimbingan Ariana Yunus dan Umami Suci Fathiyah Bailusy.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah pemerintah dalam penerapan *Geopark* Maros-Pangkep untuk mendukung keberadaan komunitas adat Bissu dan mengetahui posisi Bissu secara sosial politik dalam penerapan program *Geopark* Maros-Pangkep. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, komunitas adat Bissu menjadi bagian *Geopark* Maros-Pangkep memiliki tujuan untuk melestarikan dan memberdayakan kebudayaan ini agar eksistensi komunitas adat ini dapat terjaga.

Dasar penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian naratif dengan pendekatan analisis naratif, dimana tipe penelitian ini dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dan untuk menguji dan memvalidasi data, peneliti menguji kredibilitasnya dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun sumber data yang didapatkan peneliti meliputi data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, *Geopark* Maros-Pangkep sebagai produk pemerintah untuk melestarikan kebudayaan dan meningkatkan nilai pariwisata yang dimiliki komunitas adat Bissu dan peningkatan taraf hidup perekonomian bagi masyarakat Maros & Pangkep. Yang tentunya semua tujuan itu dibutuhkan keseriusan seluruh stake holder untuk terlibat aktif dalam bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat Maros & Pangkep.

Kata Kunci: *Geopark*, Komunitas Bissu, Pariwisata, Kebudayaan.

ABSTRACT

Danni Reinhard Arianto E041201054. Maros-Pangkep Geopark as an effort to maintain the existence of Bissu in Segeri, Pangkajene Islands Regency. Under the guidance of Ariana Yunus and Ummi Suci Fathiya Bailusy.

The purpose of this study is to determine the government's steps in implementing the Maros-Pangkep Geopark to support the existence of the Bissu indigenous community and to know the socio-political position of Bissu in the implementation of the Maros-Pangkep Geopark program. Based on the results of the research prepared, the Bissu indigenous community as part of the Maros-Pangkep Geopark has the aim of preserving and empowering this culture so that the existence of this indigenous community can be maintained.

The basis of this research uses qualitative with a narrative research type with a narrative analysis approach, where this type of research is by collecting descriptions of events or events and then compiling them into stories using storylines. With data collection techniques using interview and documentation methods. And to test and validate data, researchers test their credibility with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The data sources obtained by researchers include primary data and secondary data.

Based on the results of research that has been conducted, it can be concluded that, the Maros-Pangkep Geopark as a government product to preserve culture and increase the value of tourism owned by the Bissu indigenous community and improve economic living standards for the people of Maros & Pangkep. Of course, all these goals require the seriousness of all stakeholders to be actively involved in guidance and assistance to the people of Maros & Pangkep.

Keywords: Geopark, Bissu Community, Tourism, Culture.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Konsep Implementasi Kebijakan.....	7
2.2. Pendekatan Institusionalisme Baru.....	9
2.3. Penelitian Terdahulu.....	11
2.4. Kerangka Pemikiran.....	12
2.5. Skema Berpikir	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	14

vii

3.1.	Jenis Penelitian.....	14
3.2.	Lokasi dan Objek Penelitian	14
3.3.	Jenis dan Sumber Data	15
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.5.	Informan Penelitian.....	16
3.6.	Teknik Analisis Data	16
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI.....		18
4.1	Keadaan Geografi.....	18
4.2	Keadaan Penduduk.....	19
4.3	Gambaran Umum Kecamatan Segeri	20
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		24
5.1	Penetapan Komunitas Adat Bissu Menjadi Bagian Diversitas Budaya di Geopark Maros-Pangkep.....	24
5.1.1	Hubungan Geopark Maros-Pangkep dan Komunitas Bissu	26
5.1.2	Nilai Pariwisata Kebudayaan Komunitas Adat Bissu.....	27
5.2	Komunitas Bissu Pasca Penerapan Geopark Maros-Pangkep.....	28
BAB VI PENUTUP		35
6.1	Kesimpulan.....	35
6.2	Saran	36
LAMPIRAN		37
DAFTAR PUSTAKA.....		43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	28
Gambar 4.2	29
Gambar 4.3	32
Gambar 4.4	33
Gambar 4.5	34
Gambar 5.1	48
Gambar 5.2	49

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	30
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara multikultural tentunya memiliki keragaman budaya yang melimpah didalamnya, hal itu diperkuat dengan keberagaman suku dan budaya. Terdapat kurang lebih 1.340 (Data Sensus BPS tahun 2010)¹ suku bangsa yang ada di Indonesia, dan tentunya masing-masing suku bangsa memiliki setidaknya budaya yang menjadi keunikan atau ciri khas suatu daerah tersebut.

Wilayah Sulawesi Selatan khususnya memiliki 4 suku bangsa yang besar diantaranya Suku Makassar, Suku Bugis, Suku Mandar, Suku Toraja dengan suku Bugis sebagai suku yang cukup mendominasi sebaran wilayah suku di Sulawesi Selatan. Suku Bugis sendiri memiliki sebaran wilayah seperti di Kabupaten Bone, Pangkep, Barru, Sinjai, Wajo, Soppeng, Pinrang, Pare-Pare, Bulukumba, Enrekang, dan Maros.

Suku Bugis sebagai suku yang relatif lebih besar memiliki ciri khas di dalam kebudayaannya termasuk pengategorian gender, khususnya pada masa pra Islam dan masih berlangsung saat ini yaitu keberadaan Bissu keistimewaan Bissu adalah spesifikasi gendernya, yang tidak masuk pada kategori laki-laki maupun perempuan. Secara umum pembagian gender di dalam lingkungan masyarakat etnis-etnis di Indonesia, yang diakui adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan pembagian gender di lingkungan etnis Bugis. Davies (2017: 219-310) menyebutkan, bahwa gender di lingkungan etnis Bugis yang diakui ada lima kategori, yaitu: (1) *Oroane* adalah laki-laki baik secara fisik, maupun perannya dalam kehidupan kesehariannya. Ia tampil maskulin dan mampu menjalin hubungan dengan perempuan. (2) *Makkunrai* adalah perempuan, baik secara fisik maupun kodratnya sebagai perempuan, yang bisa jatuh cinta dan menikah dengan laki-laki, melahirkan dan mengurus anak dan keluarga dan sebagainya. (3) *Calalai* adalah perempuan yang berperenampilan seperti laki-laki. Ia secara fisik adalah perempuan, tetapi mengambil peran laki-laki dalam kehidupan kesehariannya, misalnya ia bekerja di lingkungan laki-laki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti yang dilakukan laki-laki. (4) *Calabai* adalah laki-laki yang berperenampilan seperti perempuan. Ia terlahir sebagai laki-laki, tetapi mengambil peran dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan perempuan. *Calabai* berperenampilan sangat feminim. (5) kelompok gender yang tidak termasuk pada ke empat golongan tersebut, adalah gender yang disandang oleh *Bissu*.

¹ Laman Resmi Republik Indonesia (<https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>)

..

Bissu adalah golongan yang tidak memiliki gender, ia bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan lesbian, dan bukan banci. Penampilan *Bissu* sangat istimewa, karena ia berpakaian tidak seperti laki-laki dan tidak seperti perempuan. Ia mengenakan pakaian khusus, yang hanya dikenakan oleh *Bissu*.² Masyarakat Bugis tradisional meyakini *Bissu* sebagai kombinasi dari semua jenis gender tersebut, sejauh mereka menafsirkan gender yang disandang *Bissu*, yang disamakan dengan *Calabai* (banci). Masyarakat Bugis sangat menghormati *Bissu* walaupun status gendernya tidak menunjukkan gender yang umum ada di lingkungan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pandangan masyarakat di luar masyarakat Bugis terhadap banci dan lesbian, selalu menjadi bahan olok-olok dan ejekan masyarakat karena gender yang mereka sandang dianggap sebagai suatu hal yang tidak normal dan menyalahi kaidah-kaidah agama. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa komunitas *bissu* mulai diambang kepunahan karena kurangnya regenerasi untuk melanjutkan komunitas adat ini, hal yang mendasarinya karena era modernitas yang terjadi saat ini menjadikan orang-orang mulai meninggalkan kehidupan yang sifatnya mistik dan selain dari itu aspek kehidupan ekonomi juga yang membuat *Bissu* mulai terancam punah.

Pada masa kejayaannya komunitas adat *Bissu* secara sosial cukup berdampak karena masyarakat disekitar Segeri menghargai dan memberikan tempat tersendiri kepada *Bissu* untuk melaksanakan ritual atau upacara adatnya. Kehidupan politik *Bissu* juga memiliki cukup andil pada masa kerajaan, *Bissu* dipercaya sebagai perantara antara Dewata dan raja untuk mengetahui hal baik dan buruk apa yang akan dihadapi kerajaan pada masa itu. Dan saat kehidupan modernitas di bawah kepemimpinan Puang Saidi menjadi *Puang Matowa*³ ketika pemilihan kepala daerah di kabupaten Pangkep Kepulauan, *Bissu* menjadi tempat untuk mendulang suara karena kehidupan sosial *Bissu* masa itu cukup bagus dibanding saat ini. Sedangkan kehidupan ekonomi *Bissu* pada masa kejayaannya memiliki berbagai aset yaitu *Bola Arajang*⁴ dan *Galung Arajang*⁵. Pada saat ini *Bola Arajang* masih ada walaupun keadaannya mulai memprihatinkan dan saat ini *bola arajang* hanya digunakan untuk upacara adat, sedangkan *galung arajang* tidak memiliki kejelasan karena ada beberapa yang dijadikan lahan oleh masyarakat dan diambil alih oleh pemerintah.⁶

² Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol. 2, No. 1 *Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis* (Hal. 54)

³ Puang Matowa bisa juga diartikan pemimpin dari komunitas adat *Bissu* di Segeri.

⁴ Tempat tinggal *Bissu* di Segeri ; Tempat ritual dan upacara adat.

⁵ Sawah arajang atau sawah pusaka.

⁶ Axel Jeconiah Pattinama dkk; *Eksistensi Komunitas Bissu Pada Masyarakat Desa Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan* ; Jurnal Holistik Vol 13 No. 4 (2020)

..

Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia UUD 1945 pasal 28I ayat (3) "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" dan bunyi pasal 32 UUD 1945 "(1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional" serta sebagai keseriusan pemerintah untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan budaya nasional dengan membuat UU Pemajuan Kebudayaan yang pembentukannya didasari kesadaran bahwa untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun tujuan pemajuan kebudayaan menurut UU Pemajuan Kebudayaan pasal 4 yang dimaksud adalah poin (i) Melestarikan warisan budaya bangsa. Kebudayaan nasional tentunya berkaitan erat dengan masyarakat Indonesia sebagai penggerak kebudayaan turut ditekankan dalam UU Pemajuan Kebudayaan, bahkan pemerintah pusat dan daerah ditugaskan untuk mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan dan membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dibahas dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk mengembangkan dan melestarikan budaya nasional. Sebagai upaya melestarikan kebudayaan nasional Pemerintah Sulawesi Selatan membuat *Geopark* Maros-Pangkep. *Geopark* atau taman bumi diawali ide yang dicetuskan oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*). *Geopark* adalah sebuah kawasan yang didalamnya memiliki keunikan geologi (*outstanding geologi*), yaitu nilai arkeologi, ekologi, dan budaya dengan mengikut sertakan masyarakat setempat untuk berperan dalam melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam (UNESCO, 2004).⁷ Situs *Geopark* merupakan keterpaduan konsep untuk mensejahterakan masyarakat lokal sehingga di dalam *Geopark* harus berlangsung setidaknya tiga kegiatan penting yaitu konservasi, pendidikan, dan geowisata. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikaruniai kekayaan alam yang sangat melimpah, termasuk keragaman geologi (*geodiversity*) banyak dari keragaman geologi itu merupakan warisan geologi (*geoheritage*) yang penting untuk pendidikan maupun sebagai aset wisata. Dalam rangka upaya untuk melestarikan warisan geologi dan sekaligus memperoleh manfaat yang

⁷ Jurnal Environmental Science; *Kesiapan Geopark Nasional Maros Pangkep Menuju UNESCO Global Geopark (Studi Pemandang UNESCO Global Geopark Gunung Sewu)*; Hal. 213

berkelanjutan bagi masyarakat setempat dari keberadaan warisan geologi tersebut maka konsep pembangunan melalui pengembangan Taman Bumi atau *Geopark* kini menjadi pilihan menarik termasuk di Indonesia.⁸

Sebagai dukungan pemerintah terhadap kawasan taman bumi atau juga disebut *Geopark* di Indonesia, Pemerintah membuat Komite Nasional *Geopark* Indonesia sebagai wadah koordinasi terkait *Geopark*. KNGI dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*). Menurut Perpres tersebut, KNGI merupakan wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan *Geopark*. KNGI yang bersifat *ad hoc* ini juga merupakan media bagi pengelola *Geopark* Nasional untuk meningkatkan statusnya menjadi UNESCO Global *Geopark*.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam pengelolaan *Geopark* Global UNESCO, selain Perpres No. 9 tahun 2019 tentang Taman Bumi (*Geopark*), ada juga Permen PPN/Kepala Bappenas No. 15 tahun 2020 Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi, Permen ESDM No. 1 tahun 2020 tentang Penetapan Warisan Geologi (geohéritage) dan No. 31 tahun 2021, tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional. Adapula Permen Parekraf/Kepala Barekraf No. 2 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* sebagai Destinasi Pariwisata, serta Kepmenko Bidang Kemaritiman dan Investasi No. 39 tahun 2020 tentang Mekanisme Tata Kerja, keanggotaan, dan Struktur Organisasi Komite Nasional *Geopark* Indonesia. Maka dari itu implementasi pengelolaan *Geopark* di Indonesia di koordinir oleh Kemenko Kemaritiman. Di Indonesia sendiri terdapat 10 UNESCO Global *Geopark*, 9 National *Geopark*, dan 5 calon *Geopark* Nasional, salah satu *Geopark* yang sudah mendapatkan predikat UNESCO Global *Geopark* yaitu *Geopark* Maros-Pangkep.

Geopark Maros-Pangkep sebelum mendapatkan predikat UNESCO Global *Geopark* melalui berbagai tahap dan proses. Dimulai tahun 2013 Maros dan Pangkep, dilakukan beberapa observasi, penelitian, dan pengelompokan serta pada Juli 2015 dilakukan inisiasi awal lahirnya *Geopark* Maros-Pangkep. Juni 2017 Gubernur Sulawesi Selatan membentuk tim percepatan *Geopark* Maros-Pangkep, dan akhirnya 20 November 2017 *Geopark* Maros-Pangkep ditetapkan sebagai *Geopark* Nasional. Saat ini terdapat 31 *site* yang terbagi dari 21 *geosite*, 4 *biosite*, 5 *cultural site*, dan 1 *intangible site*.

Dilansir dari laman UNESCO, *Geopark* Maros-Pangkep resmi ditetapkan sebagai salah satu UNESCO Global *Geopark*. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan yang diambil pada sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis, Rabu 24 Mei 2023. Secara umum *geosite* Maros-Pangkep dibagi menjadi 3,

⁸ Ibid; Hal. 214.

..

Geodiversitas (keanekaragaman geologi), Biodiversitas (keanekaragaman hayati), dan Diversitas budaya (keanekaragaman budaya) secara data *geosite* yang terletak di *Geopark* Maros-Pangkep berjumlah 31 *site*. *Geosite* diversitas budaya salah satu upaya untuk melakukan pemberdayaan dan melestarikan budaya lokal, *geosite* keanekaragaman budaya salah satunya ialah *Geosite* Komunitas Adat Bissu ini berada di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. *Geopark* Maros-Pangkep sebagai *geosite* diversitas budaya tentunya memiliki tujuan dan fungsi untuk melestarikan dan merawat seluruh aspek kebudayaan dalam hal ini komunitas adat Bissu, bagaimana program kebijakan ini dapat dirasakan dampaknya oleh komunitas adat yang terancam punah tersebut.

Kehadiran *Geopark* Maros-Pangkep utamanya pelestarian diversitas budaya menjadi hal yang mendasar sekaligus untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur komunitas adat, dan benarkah ini sebagai langkah kebijakan yang tepat guna untuk melestarikan komunitas adat Bissu. Perkembangan kajian keilmuan politik dewasa ini menjadikan permasalahan politik bukan hanya menyangkut soal kebijakan publik atau negara saja tetapi melihat aspek sosial budaya juga didalamnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai: **Geopark Maros-Pangkep Sebagai Upaya Untuk Mempertahakan Eksistensi Bissu di Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana program *Geopark* Maros-Pangkep dalam mendukung keberadaan komunitas adat Bissu?
2. Bagaimana penerapan program *Geopark* Maros-Pangkep pada posisi Bissu secara sosial politik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk Mengetahui langkah *Geopark* Maros-Pangkep dalam mendukung keberadaan komunitas adat Bissu komunitas adat Bissu.
2. Untuk Mengetahui posisi Bissu secara sosial politik dalam penerapan program *Geopark* Maros-Pangkep.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang mengenai kebijakan *Geopark* Maros-Pangkep dalam upaya melestarikan budaya nasional Indonesia.
- b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik dan budaya politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai kebijakan budaya politik .
- b. Menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah dalam melestarikan budaya nasional Indonesia.
- c. Menjadi acuan pembelajaran bagi para elit politik kedepannya untuk mengawal isu kebudayaan nasional Indonesia.
- d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori kebijakan publik dengan pendekatan institusionalisme baru dan kajian sosiologi politik dengan teori struktural fungsional. Sebagai landasan teoritis dan alat analisis utama dalam penelitian mengenai *Geopark* Maros-Pangkep sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi Bissu di Segeri, Pangkep. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka berpikir penelitian ini yang tergambar dalam skema pikir. Untuk menunjukkan kebaruan penelitian ini, disajikan pula beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

2.1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses umum tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada fokus dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.⁹

Secara sederhana konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output, dan outcome. Berdasarkan deksripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. selanjutnya implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Studi implementasi kebijakan dibagi kedalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau hakekat

⁹ Haedar Akib ; Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana ; *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 tahun 2010* : hal 1

..

implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada determinan keberhasilan implementasi kebijakan, model konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Studi yang representatif pada mas ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis (Ann O'M Bowman dalam Rabin 2005)¹⁰

Implementasi sangat diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Sejalan dengan itu T. B. Smith juga mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika dianalogikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan.¹¹

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (Dye, 1981). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

Sedangkan model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses dinamis, karena pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan para pemangku kepentingan (stakeholder). Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan pada setiap fase pelaksanaannya dapat diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, meskipun persyaratan input sumber daya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika

¹⁰ Ibid. Hal 2

¹¹ Ibid. Hal 3

..

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.¹²

Berdasarkan dua model diatas, model interaktif menjadi acuan peneliti untuk menjelaskan bagaimana peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengambil kebijakan dan Badan Pengelola Geopark Maros-Pangkep sebagai pelaksana kebijakan. Serta bagaimana yang dirasakan secara langsung pengguna kebijakan yaitu komunitas adat Bissu terhadap penerapan program Geopark Maros-Pangkep.

2.2. Pendekatan Institusionalisme Baru

Kajian politik tentunya tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik, sebagaimana proses politik melahirkan sebuah kebijakan. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya¹³.

Menurut David Easton, ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making of public policy*) David Easton dalam buku *The Political System* menyatakan, kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat (*political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society*)¹⁴.

Institusionalisme baru merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu.¹⁵ Pada intinya institusi politik dapat dipahami sebagai aturan permainan yang dapat dilihat dari sudut pandang formal (undang-undang, peraturan-peraturan tertulis) atau informal (kebiasaan, norma sosial, adat istiadat dan sebagainya). Secara sederhana kehadiran institusi politik dapat dipastikan adanya aturan-aturan

¹² Ibid. Hal 8

¹³ Miriam Budiardjo ; *Dasar-Dasar Ilmu Politik* ; (Hal. 20)

¹⁴ Ibid. Hal. 21

¹⁵ Ibid. Hal. 96

atau pola yang mengatur kehidupan bersama atau kepentingan kolektif yang ada dalam suatu masyarakat.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Dalam kebijakan publik sendiri memiliki beberapa pendekatan, salah satunya ialah pendekatan institusionalisme baru.

Perbedaan institusionalisme baru dan lama ialah perhatian institusi baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, pasar dan globalisasi ketimbang pada masalah konstitusi yuridis saja. Bagi penganut institusionalisme baru, pokok masalah ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif.

Pendekatan institusionalisme baru memandang institusi sebagai unsur penting dalam memahami interaksi dan perilaku aktivitas politik. Institusi baik formal maupun informal, memainkan peran besar dalam menentukan bagaimana individu dan kelompok dalam masyarakat bereaksi terhadap tuntutan politik. Menurut pendekatan ini, institusi memiliki kaidah dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pendekatan institusionalisme baru juga erat dengan kajian sosiologis maka dari itu berdampak bukan hanya produk politik saja, tetapi berdampak besar terhadap perkembangan interaksi sosial dan politik. Institusi mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok memahami dan bereaksi terhadap isu politik dan membentuk keyakinan dan nilai-nilai mereka.

Menurut Robert E. Goodin, inti dari institusionalisme baru dirumuskan sebagai berikut:

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, perilaku dari mereka yang memegang peran itu.
3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.
4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis, sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi

..

peluang serta kekuatan yang berbeda pada individu dan kelompok masing-masing.¹⁶

Kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk mempertahankan komunitas adat Bissu di Segeri, Pangkep dengan menjadikannya *site* budaya pada *Geopark* Maros-Pangkep. Tetapi apakah hal itu dinilai tepat untuk mempertahankan eksistensi komunitas adat tersebut berkenaan dengan UU Pengembangan Budaya Nasional, yang didalamnya jelas mengatakan bahwa Pemerintah daerah maupun pusat harus melestarikan dan menjaga kekayaan budaya Indonesia.

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sandrawati Hukom dalam skripsi berjudul "Eksistensi Masyarakat Adat di Pangkep Dalam Kajian Sosiologi Politik". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi komunitas adat tersebut semakin menyusut diakibatkan pelaksanaan upacara adat yang tidak teratur menyebabkan regenerasi Bissu tidak terjadi. Kejayaan Bissu yang semakin surut membawa dampak pada pelestarian budaya dan tradisi Bugis lainnya. salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan eksistensi Bissu tersebut dengan melibatkan para kaum Bissu dalam acara-acara pemerintah seperti memasuki rumah baru, penjemputan para pejabat pemerintah, dan penampilan pementasan Bissu yang sudah ada sejak masa kerajaan. Pelestarian kebudayaan komunitas Bissu tidak hanya sampai disitu, berbagai cara upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Pangkep untuk melestarikan dan membangun nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh kabupaten Pangkep untuk tetap menjaga warisan budaya yang dimiliki. Keberhasilan Bissu masih bisa bertshan hingga kini tidak lepas dari 3 faktor yaitu keseimbangan antara upacara, regenerasi, dan pendukung atau aktor kehadiran Bissu adalah elemen penting dalam kelangsungan keberadaan Bissu.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Indriani dalam artikel yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Bissu di Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep" hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan Bissu memiliki perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. kegiatan yang dilakukan Bissu ini menyimpang dari agama karena memuja benda pusaka *arajang* dan berkomunikasi dengan roh dewata. Dilihat dari kacamata budaya bahwa keberadaan Bissu dan peranannya dalam budaya ini tidaklah menyimpang dari

¹⁶ Ibid. (Hal. 98-99)

agama dan tetap menjalankan dan mempertahankan karena menganggap bahwa ini adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan.

3. Penelitian yang dilakukan Hanief Saha Ghafur pada artikel jurnal yang berjudul “Relasi Kebudayaan dalam Kebijakan Publik dan Sistem Regulasi Negara” hasil dari penelitian ini adalah relasi kebudayaan dengan kebijakan publik ibarat mempertemukan dua teori dalam dua disiplin ilmu yang berbeda. Kebudayaan banyak dikaji dan dikembangkan dalam ilmu antropologi dan sosiologi. Sedangkan kebijakan banyak dikaji dan dikembangkan oleh ilmu administrasi dan manajemen. Kebijakan publik tidaklah semata keputusan yang dibuat atau tidak dibuat oleh penyelenggara negara dan pemangku pemerintahan. kebijakan publik juga tidak semata mengkaji isi kebijakan, tapi sekaligus juga latar belakang dan proses bagaimana kebijakan itu dibuat dan diimplementasikan. Artikel ini menjelaskan tentang pintu masuk analisis kebudayaan dalam proses kebijakan publik dan pengaturan negara (tata kelola pemerintahan dan peraturan perundang-undangan). Juga menjelaskan tentang pengaturan negara sebagai suatu sistem budaya dan komunitas kebijakan sebagai bidang sosial semi otonom.

Dari ketiga penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penelitian tersebut memperlihatkan persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian diatas adalah meneliti mengenai posisi kebijakan pemerintah dalam mempertahankan dan membuat regulasi untuk keberlangsungan budaya dalam hal yang diteliti oleh penulis ialah komunitas adat Bissu dan melihat aspek kehidupan sosial Bissu. Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah fokus kajian mengenai kebijakan *Geopark* Maros-Pangkep sebagai upaya pemerintah Sulawesi Selatan untuk melestarikan budaya komunitas adat Bissu di Segeri, Pangkep.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mengacu kepada teori dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan atau mengkaji suatu permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi peneleti untuk memuat hasil penelitian berdasarkan teori dan kerangka pemikiran ini.

Pada Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Institusionalisme Baru dalam menganalisis kebijakan *Geopark* Maros-Pangkep dalam upaya memelihara dan menjaga eksistensi komunitas adat Bissu dan teori struktural fungsional untuk mengkaji posisi Bissu secara sosial politik dalam penerapan *Geopark* Maros-Pangkep. Peneliti ingin melihat bahwa kebijakan *Geopark* Maros-Pangkep ini apakah bisa mempertahankan eksistensi Bissu di Segeri, Pangkep, serta bagaimana metode teknis pelaksanaan untuk mempertahankan eksistensi

komunitas adat Bissu. Secara umum Konsep kebijakan publik menjadi payung melingkupi pendekatan institusionalisme baru dan teori struktural fungsional, walaupun teori struktural fungsional dikenal sebagai paradigma dari sosiologi politik tetapi teori struktural fungsional dipandang oleh penulis tepat untuk melihat bagaimana peranan setiap elemen yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini dan objek yang merasakan implementasi kebijakan ini yaitu komunitas Bissu sehingga tercipta keseimbangan atau kestabilan.

Teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjadi alat analisis untuk mengkaji topik pembahasan yang diteliti. Seperti yang dibahas pada paragraf sebelumnya pendekatan institusionalisme baru sebagai alat analisis untuk melihat kebijakan pemerintah melalui *Geopark* Maros-Pangkep apakah berjalan sebagaimana mestinya atau terdapat kendala didalamnya. Sedangkan teori struktural fungsional sebagai alat analisis untuk melihat posisi komunitas adat Bissu secara sosial politik dalam kehidupannya sehari-hari.

2.5. Skema Berpikir

